

Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin di DKI Jakarta

*Fayola Hasna Amaranti***, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia. E-mail:*

fayola.hasnaamaranti.an20@mhsw.pnj.ac.id

*Risya Zahrotul Firdaus**, Politeknik Negeri Jakarta Depok, Indonesia. E-mail:*

risya.zahrotulfirdaus@bisnis.pnj.ac.id

Narulita Syarweni, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia. E-mail:*

narulita.syarweni@bisnis.pnj.ac.id

Abstrak

Pada tanggal 31 Desember 2019, diumumkan lusinan kasus pneumonia di Wuhan, China yang kemudian dilaporkan kepada WHO sebagai virus yang belum diketahui jenisnya. Virus yang mewabah di Wuhan, China itu menginfeksi hingga ke Washington, AS untuk yang pertama kalinya. Sehingga pada bulan Februari 2020 WHO memberi nama virus corona baru (Covid-19). Tak lama setelah itu, tepatnya pada bulan Maret 2020 ditemukan dua WNI positif terpapar virus Covid-19. Seiring berjalannya waktu, kasus positif covid-19 jumlahnya semakin melonjak terutama di wilayah DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan pemerintah DKI Jakarta menerpkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berarti segala jenis kegiatan masyarakat dibatasi. Kebijakan PSBB ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin.

Keyword---Covid-19, perekonomian, masyarakat, DKI Jakarta

Abstract

On December 31, 2019, dozens of pneumonia cases were announced in Wuhan, China which were later reported to WHO as an unknown virus. The virus that is endemic in Wuhan, China has infected Washington, USA for the first time. So in February 2020 WHO gave the name the new corona virus (Covid-19). Shortly after, in March 2020, it was found that two Indonesian citizens were positively exposed to the Covid-19 virus. Over time, the number of positive COVID-19 cases has increased, especially in the DKI Jakarta area. This has caused the DKI Jakarta government to implement a large-scale social restriction (PSBB) policy, which means that all types of community activities are restricted. This PSBB policy greatly affects the community's economy, especially for the poor.

Keyword---Covid-19, economy, society, DKI Jakarta

A. PENDAHULUAN

Sudah setahun sejak pandemi covid-19 mewabah di Indonesia. Pandemi tersebut tentunya berdampak pada bidang kesehatan, perekonomian, pariwisata, politik, pendidikan, dan sosial. Namun, perekonomian adalah bidang yang dampaknya paling signifikan dan terasa. Untuk memutus rantai penyebaran covid-19, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Misalnya, diberlakukannya kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Semenjak diberlakukannya PSBB, aktivitas masyarakat yang berupa perdagangan, perkantoran, lalu lintas, sekolah, kegiatan keagamaan, bahkan transportasi kerap dibatasi. Oleh karena itu, perekonomian segala lapisan masyarakat ikut terpengaruh. Namun, yang menjadi fokus utama dalam jurnal ini adalah mengenai perekonomian masyarakat miskin. Masyarakat miskin menjadi fokus permasalahan karena mereka harus tetap bertahan hidup sementara pendapatan mereka berkurang.

Masyarakat miskin

Ada beberapa definisi mengenai masyarakat miskin. Menurut Lembaga penyelenggara sensus penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep *basic needs approach* yang artinya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Supriatna (1997:90), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang serba terbatas dan kemiskinan terjadi bukan keinginan atau kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin bila tingkat pendidikan rendah, produktivitas kerja rendah, pendapatan rendah, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya juga rendah, kemudian mereka menunjukkan ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Booth dan Me Cawley dalam Moeljarto T. (1993) menjelaskan jika

suatu negara diukur pendapatan perkapitanya, banyak negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat, akan tetapi hal itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin sangat dirugikan dan tidak memperoleh manfaat apa-apa. Lebih lanjut, untuk memecahkan masalah kemiskinan ini perlu kebijaksanaan dalam mengidentifikasi golongan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Pada umumnya, suatu masyarakat dapat disebut miskin bila ditandai oleh keadaan hidup kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer adalah keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan aspek sekunder adalah sumber pendapatan, jaringan sosial, dan informal yang mencakup air, rumah, kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya pendidikan maupun pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (fenomenologi), berdasarkan dari data literasi dan pengamatan penulis.

B. PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 yang sudah menginfeksi hampir seluruh negara di muka bumi sejak setahun yang lalu ini berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Sedangkan pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen. Angka tersebut berbanding terbalik dengan

kuartal II tahun 2019 sebesar 5,02 persen. (CNN Indonesia : 2020)

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebab, DKI Jakarta merupakan Penggerak ekonomi nasional, segala aktivitas mulai dari perusahaan nasional, perusahaan asing, pusat perbankan, penggerak sektor jasa dan perdagangan, hingga penggiat usaha kecil dan menengah ada di DKI Jakarta.

Menurut pandangan Latif Adam, pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Sektor pelayanan jasa banyak mendominasi perekonomian DKI Jakarta. Perekonomian Jakarta yang kuat dan besar tidak terlepas dari sektor infrastruktur yang cukup mumpuni. (Pratomo : 2012)

Akibat adanya Pandemi covid-19 dan kebijakan baru pemerintah yang berdampak langsung pada perekonomian, masyarakat harus hidup sesuai aturan yang telah ditetapkan dan diatur pemerintah. Hal ini ternyata berimbas pada timbulnya masalah lain yaitu meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Ibu kota. Jadi, persoalan masyarakat miskin ini menjadi masalah yang harus segera diatasi.

Berdasarkan pernyataan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat penyampaian pidato laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, walaupun jumlah penduduk miskin di Jakarta masih paling rendah dibandingkan provinsi lain, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta meningkat. Pada September 2019, DKI Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3,42 persen atau sejumlah 362.300. Kemudian pada September 2020 meningkat lagi menjadi 4,69 persen atau sejumlah 496.840. (Wiryo : 2021)

Sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, pendapatan masyarakat yang menurun tercermin dari berkurangnya agregat demand konsumsi rumah tangga memberi tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat yang juga meningkatkan risiko menjadi penduduk miskin.

DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini membuat restoran, transportasi, pariwisata, dan sektor ritel seakan mati suri karena masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah. Sebagian pekerja di DKI Jakarta bekerja di sektor informal dan UMKM, sementara mereka sangat bergantung dari situasi ekonomi yang terpaksa melambat karena adanya pandemi.

Tingkat penularan Covid-19 yang tinggi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PSBB. Kebijakan yang membatasi aktivitas perdagangan dan aktivitas perkantoran ini menyebabkan berkurangnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan bagi sebagian lapisan masyarakat. Sehingga bagi mereka yang pendapatannya berkurang dan yang kehilangan pekerjaan harus dipastikan agar dapat bisa bertahan meski dalam kondisi yang serba kekurangan. Ada beberapa kelompok orang yang membutuhkan suplai makanan pokok. Kelompok itu adalah para buruh, pekerja informal, pengemudi ojek, *freelancer*, UMKM, dan pekerja lain yang mengandalkan hidup dari penghasilan harian.

Dalam rangka menekan dampak dari pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Bantuan tersebut misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana APBD DKI Jakarta dan disalurkan melalui rekening Bank DKI sebesar Rp300.000/bulan. (Corona Jakarta : 2021).

Bantuan lain yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah program Kolaborasi Sosial Berskala Besar Pangan (KSBB) Pangan. Pemerintah memfasilitasi KSBB Pangan untuk membantu sesama. Dimana bantuan yang diberikan bersumber dari masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat. Sasaran KSBB Pangan adalah RW prioritas, pesantren, panti asuhan, panti jompo, panti disabilitas, dan yayasan atau komunitas lain yang membutuhkan bantuan. (Nafizahni dan Sofa : 2020)

Bebeda dengan KSBB Pangan, KSBB UMKM adalah program yang dikhususkan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta. Dalam program ini terdapat 3 jenis paket bantuan yaitu, paket sarana prasarana, paket pinjaman modal, dan paket pelatihan. Paket sarana prasarana terdiri atas paket UMKM Pangan senilai Rp200.000,00 per UMKM dan sarana penunjang usaha seperti masker, *face shield*, apron, dan lain-lain. Paket pinjaman modal Berupa uang tunai sebagai pinjaman modal yang terdiri dari Paket usaha senilai Rp5.000.000,00 per usaha, Rp7.500.000,00 per usaha, dan paket senilai Rp10.000.000,00 per usaha. Paket pelatihan berupa pelatihan *hardskill* dan *softskill* dalam wirausaha. (Nafizahni dan Sofa : 2020)

Akan tetapi, upaya pemerintah itu belum cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Meskipun pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial pada masyarakat miskin namun, pemerintah belum menciptakan lapangan kerja yang dapat menaikkan kelas pekerja informal menjadi pekerja formal.

C. PENUTUP

Kesimpulan :

Pandemi Covid-19 yang telah menyebar luas ini berdampak pada bidang kesehatan,

perekonomian, pariwisata, politik, pendidikan, dan sosial. Namun, perekonomian adalah bidang yang dampaknya paling signifikan. Pemerintah telah melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui kebijakan PSBB. Kebijakan tersebut membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Sebagian pekerja di DKI Jakarta bekerja di sektor informal dan UMKM, sementara mereka sangat bergantung dari situasi ekonomi yang terpaksa melambat karena adanya pandemi. Pada kasus ini, masyarakat terutama masyarakat miskin harus bisa bertahan hidup. Untuk itu, pemerintah menyalurkan BLT dan program-program bantuan seperti KSBB Pangan dan KSBB UMKM untuk mereka. Akan tetapi, upaya pemerintah tersebut masih dinilai kurang karena pemerintah belum menciptakan lapangan kerja yang dapat menaikkan kelas pekerja informal menjadi pekerja formal.

Saran :

Masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 ini perlu mendapat perhatian lebih karena pada kondisi seperti ini jumlah kemiskinan dapat meningkat. Selain itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah harus dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat menaikkan kelas pekerja informal menjadi pekerja formal.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. 2021 “Kemiskinan naik, Kado Pahit Ibu Kota di Usia ke-494”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210620110304-532-656838/kemiskinan-naik-kado-pahit-ibu-kota-di-usia-ke-494/1>,
,Diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 19.15 WIB.

- CoronaJakarta. 2021 “Bantuan Sosial”,
<https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial>, diakses pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 21.15 WIB
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2021 "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global",
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.43 WIB
- Halodoc. 2020 “Timeline Virus Corona, Dari Desember 2019 Hingga Kini”,
<https://www.halodoc.com/artikel/timeline-virus-corona-dari-desember-2019-hingga-kini>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 21.55 WIB.
- Kadji, Yulianto. 2013 “Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya”,
https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan-dan-Konsep-Teoritisnya.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 23.30 WIB
- Paat, Yustinus. 2021 “Dampak Covid-19, Anies Sebut Orang Miskin di Jakarta Tambah 3,6 Juta Jiwa”,
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/626351/dampak-covid19-anies-sebut-orang-miskin-di-jakarta-tambah-36-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.35 WIB
- Pratomo, Harwanto Bimo. 2012 “DKI Jakarta, penyumbang terbesar ekonomi nasional”.
<https://www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 19.05 WIB
- Rizal, Jawahir Gustav. 2020 "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?",
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 16.55 WIB.
- Smartcity.jakarta.go.id. 2020 “Tiga Program Bantuan Pemprov DKI Jakarta Selama Pandemi Covid-19”,
<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/559/tiga-program-bantuan-pemprov-dki-jakarta-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 14.20 WIB
- VOI. 2021 “Penyebab kemiskinan, Definisi, dan Data Orang Miskin di Indonesia”,
<https://voi.id/ekonomi/37805/penyebab-kemiskinan-definisi-dan-data-orang-miskin-di-indonesia>, diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 20.05
- Wiryo, Singgih. 2020 “Jumlah Penduduk miskin Jakarta Meningkat, Anies: terendah Dibandingkan Provinsi Lain”
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/19/15205961/jumlah-penduduk-miskin-jakarta-meningkat-anies-terendah-dibandingkan>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 23.50 WIB

